

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Elmi Dwi Rohma

elmidwirohma.1398@gmail.com

Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of a performance-based budget on the performance accountability of Surabaya Government institutions. The research used four variables, namely budget planning (X1), budget implementation (X2), budget reporting/accountability (X3), and performance evaluation (X4). The research was quantitative. Moreover, the population was 22 Surabaya agencies. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 66 samples of people who were involved in Government budget arrangements. Additionally, the data were primary, in the form of questionnaires; which were distributed to respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for Social Science) 26. The research result concluded that budget planning had a positive effect on the performance accountability of Surabaya Government institutions. Likewise, budget implementation had a positive effect on the performance accountability of Surabaya Government institutions. Similarly, budget reporting/accountability had a positive effect on the performance accountability of Surabaya Government institutions. Also, performance evaluation had a positive effect on the performance accountability of Surabaya Government institutions.

Keywords: planning, implementation, reporting, evaluation, accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3) dan evaluasi kinerja (X4). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 22 dinas Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan sampel yang diambil adalah 66 orang yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sumber data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya, pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya, evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Kata Kunci: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang menurun. Dalam mengatasi virus tersebut, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi

Covid-19 di Indonesia menyebabkan kerugian yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan karena adanya pandemi Covid-19. Dalam perubahan tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk mempercepat *refocusing* kegiatan dan realisasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan awal reformasi pengelolaan keuangan negara Indonesia yang membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah. Setelah itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Anggarini dan Puranta, 2010).

Anggaran berbasis kinerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa anggaran disusun berdasarkan prestasi kinerja yang dicapai. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen berkaitan dengan pendanaan setiap kegiatan untuk mencapai hasil dari keluaran anggaran tersebut. Menurut Anggarini dan Puranta (2010) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara efektif dilaksanakan untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasi dalam sebuah instansi maka dapat dilakukan evaluasi sumber input dengan output untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diperoleh secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran yang telah ditentukan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun secara periodik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban/pelaporan yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah dan pentingnya laporan kinerja dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah secara relevan selama satu periode.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala. Untuk menciptakan akuntabilitas dalam penerapan anggaran maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan proses penyusunan anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: perencanaan anggaran,

pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena semakin baik penerapan anggaran yang dilakukan maka akuntabilitas kinerja yang dilakukan akan semakin baik dan efektif. Berikut merupakan data anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Kota Surabaya pada tahun 2019-2020.

Tabel 1
Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kota Surabaya

Instansi Pemerintah Kota Surabaya	2019			2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.420.303.668.110	1.364.366.958.734	96,06	1.028.601.276.230	946.059.072.886	91,98
Dinas Lingkungan Hidup	27.744.567.941	26.583.350.281	95,81	23.491.833.753	22.507.325.483	95,81
Dinas Perhubungan	422.953.762.447	405.190.669.579	95,80	252.664.357.990	214.713.364.543	84,98
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	53.474.588.332	50.966.045.776	95,31	46.969.753.038	40.437.794.837	86,09
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	990.140.194.111	937.239.169.587	94,66	926.821.583.582	853.813.253.036	90,18
Dinas Pemadam Kebakaran	144.610.522.140	136.795.625.694	94,60	86.230.753.411	82.554.506.198	95,74
Dinas Pendidikan	1.762.132.530.643	1.662.583.169.587	94,35	1.632.415.375.137	1.505.117.845.295	92,20
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.913.242.209	47.042.707.958	94,25	47.315.970.161	45.805.418.823	96,81
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.028.810.886	32.965.715.932	94,11	32.550.433.075	31.754.995.833	97,56
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.620.390.393	52.891.681.942	93,41	53.727.043.383	51.198.911.422	95,29
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	414.274.430.660	385.529.506.771	93,06	198.595.967.262	105.712.385.047	53,23
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	875.854.276.106	814.990.333.380	93,05	819.425.007.615	745.027.737.034	90,92
Dinas Tenaga Kerja	33.302.009.057	30.986.428.310	93,05	23.473.898.512	20.136.980.169	85,78
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	23.515.343.596	21.811.572.218	92,75	20.424.276.687	19.627.510.609	96,10
Dinas Kepemudaan dan	124.727.816.794	115.312.837.463	92,45	68.409.497.314	53.018.770.457	77,50

Olahraga							
Dinas Sosial	272.443.872.388	250.786.576.850	92,05	96.364.736.778	89.435.814.181	92,81	
Dinas							
Komunikasi dan Informatika	109.756.824.296	100.982.414.335	92,01	65.475.077.888	60.338.734.906	92,16	
Dinas							
Perdagangan	41.526.754.138	38.190.832.670	91,97	35.651.603.848	33.913.627.595	95,13	
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro							
	24.669.106.473	22.526.065.223	91,31	21.620.564.455	20.752.281.852	95,98	
Dinas Kesehatan							
	832.991.696.086	754.252.177.455	90,55	952.645.483.142	852.134.138.954	89,45	
Dinas							
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37.328.706.273	33.297.934.530	89,20	29.259.016.142	23.822.578.734	81,42	
Satuan Polisi Pamong Praja							
	66.656.660.261	63.154.027.394	94,75	68.840.187.742	66.093.848.042	96,01	
Jumlah	7.819.969.773.340	7.348.445.801.669	93,97	6.530.973.697.145	5.883.976.895.936	90,09	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Diolah 2021)

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja seluruh Dinas Kota Surabaya selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebesar 93,97% dan tahun 2020 sebesar 90,09%, maka dapat disimpulkan bahwa periode 2019-2020 mengalami penurunan target anggaran dan realisasi. Sehingga penyerapan anggaran yang dilakukan belum optimal atau tidak mencapai target 100%, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat capaian kinerja belum sepenuhnya optimal sehingga memicu penilaian kinerja menjadi kurang objektif. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, dimana anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya optimal untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat pentingnya peran Dinas Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Kota Surabaya dituntut agar lebih profesional dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah dibuat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Surabaya?, 2) Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Surabaya?, 3) Apakah Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Surabaya?, 4) Apakah Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Surabaya?

TINJAUAN TEORITIS

New Public Management

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa manajemen sektor publik mengalami perubahan pada pertengahan tahun 1980 dari sistem manajemen tradisional yang terkesan birokratis, hierarki dan kaku menjadi manajemen sektor publik yang lebih fleksibel dan mengakomodasi pasar. *New Public Management* dapat mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Dalam penerapan konsep *New Public Management* untuk mencapai target kerja maka organisasi sektor publik dilakukan secara profesional. Dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Konsep ini merupakan perubahan untuk perbaikan penganggaran pemerintah yang sebelumnya masih tradisional.

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2006) anggaran merupakan rencana operasi keuangan dalam periode tertentu yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk pembiayaan. Sedangkan Mahmudi (2016) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mempunyai keterkaitan antara anggaran dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan dan program tersebut. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008), terdapat 5 unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu : (1) Pengukuran kinerja, (2) Penghargaan dan hukuman, (3) Kontrak kinerja, (4) Kontrol eksternal dan internal, (5) Pertanggung jawaban manajemen

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terukur melalui tahapan siklus anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran daerah memiliki beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah yang secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunnya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran.

Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara periodik yang mencakup: 1) Laporan realisasi anggaran, 2) Neraca, 3) Catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Evaluasi Kinerja

Menurut Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang sudah direncanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala. Sementara Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan dari pengumpulan sumber daya dan penggunaannya sebagai dasar pelaporan keuangan di pemerintahan

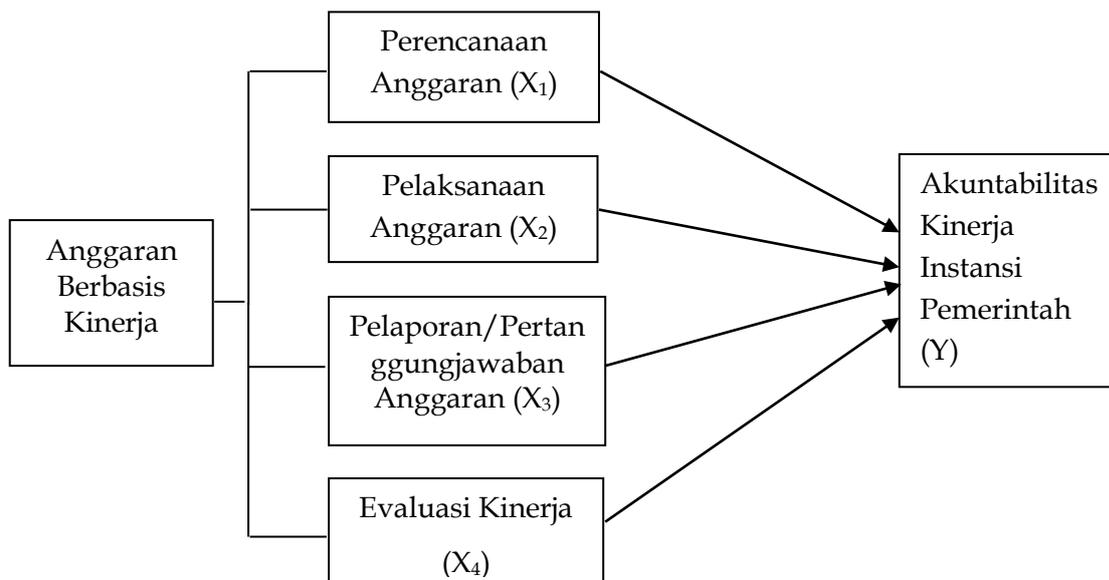
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang telah ditetapkan, b) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, c) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, d) Menyajikan kegagalan/keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, e) Jujur, transparan, akurat dan objektif, f) Berdasarkan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari prinsip yang telah diuraikan diatas, maka suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi harus lebih efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan suatu komitmen yang kuat dari organisasi dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rerangka Pemikiran

Dinas Kota Surabaya merupakan lembaga atau organisasi pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas atau wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang, tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan anggaran merupakan tahapan awal dalam pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan dalam rentra organisasi. Berdasarkan penelitian Sya'Roni dan Widyawati (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

H₁: Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan terlaksananya anggaran dari kegiatan yang ada di instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dalam pertanggungjawabannya bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan (output) dalam sistem akuntansi keuangan. Berdasarkan penelitian Ginanjar *et al.*, (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Polda Papua) menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

H₂: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan/Pertanggungjawaban mencakup alokasi anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian keberhasilan kegiatan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberi informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Berdasarkan penelitian Anwar *et al.*, (2016) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

H₃: Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi kinerja digunakan untuk menganalisis upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan jika terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran. Selain itu, evaluasi kinerja merupakan analisis untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan penelitian Ginanjar *et al.*, (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Polda Papua) menunjukkan hasil bahwa evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

H₄: Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dalam bentuk survei. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi variabel dependen, sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/

pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja menjadi variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada seluruh Dinas Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Sugiyono (2013:85) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 66 responden. Adapun kriteria responden yang ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut: (1) Memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala bagian, staf akuntansi/keuangan, (2) Terlibat dalam penyusunan dan pelaporan anggaran di Dinas Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Dalam penelitian ini data primer berasal dari kuesioner yang telah direspon oleh pegawai yang bekerja pada Dinas Kota Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional variabel

Variabel Independen

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan tahap estimasi pengeluaran untuk kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang dirumuskan pada renstra organisasi.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh pihak instansi yang bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran dan output dalam sistem akuntansi keuangan.

Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dan pencapaian hasil kerja yang telah dilakukan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja digunakan untuk menganalisis upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan jika terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran. Evaluasi kinerja merupakan analisis untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Evaluasi kinerja juga dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisa upaya pencapaian tujuan telah ditetapkan, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan maka pimpinan bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Variabel diatas diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Variabel Dependen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran yang ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah. Variabel tersebut diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden diukur menggunakan skala Likert dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan deskripsi atau gambaran dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, varian, standar deviasi, minimum, maksimum. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan demografi responden dari pegawai Dinas Kota Surabaya yang menjadi sampel dan data demografi meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama bekerja.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas diperlukan untuk menguji benar atau tidaknya suatu kuesioner sebagai indikator pengambilan data yang digunakan dalam penelitian. Untuk menentukan benar atau tidaknya data yang didapat maka dilakukan perbandingan dengan r hitung dan r tabel. a) Apabila r hitung $>$ r tabel maka disimpulkan bahwa pernyataan indikator yang digunakan benar atau valid, b) Apabila r hitung $<$ r tabel maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan indikator yang digunakan tidak benar atau tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner pada indikator dari variabel atau konstruk. Hasil kuesioner akan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan tidak secara acak dalam menjawab pertanyaan. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha, dengan kriteria Cronbach Alpha $>$ 0,60 dari masing-masing variabel maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. (Ghozali, 2016)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian model regresi untuk menentukan apakah terdapat variabel residual yang berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2016) uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot memiliki ketentuan bahwa jika data berada dekat atau mengikuti garis sumbu diagonalnya, maka nilai residual berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan melalui pendekatan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pendekatan Kolmogorov-Smirnov (K-S) memiliki ketentuan bahwa probabilitas $>$ 0,05 maka distribusi model regresi menyebar secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menguji model regresi untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen maka model regresi dapat dikatakan baik. Menurut Ghozali (2016) untuk menentukan apakah terdapat multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan nilai tolerance $>$ 0,1 dan VIF $<$ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik dan model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali (2018) memaparkan bahwa uji heteroskedastisitas dapat melihat titik-titik yang menyebar secara acak pada grafik scatterplots antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SREID.

Analisis Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) bahwa analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji lebih dari satu variabel independen (bebas). Bentuk persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$AKIP = \beta_0 + \beta_1PrA + \beta_2PIA + \beta_3PjA + \beta_4EK + e$$

Dimana :

AKIP: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

β : konstanta

PrA : Perencanaan Anggaran

PIA : Pelaksanaan Anggaran

PjA : Pelaporan Anggaran

EK : Evaluasi Kinerja

e : error

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan ketentuan nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika nilai R^2 yang diperoleh mendekati angka 0 maka semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun apabila nilai R^2 yang diperoleh mendekati angka 1 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) uji hipotesis (uji t) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan menggunakan probabilitas signifikan (Ghozali, 2016) yaitu: a) Jika angka probabilitas signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, b) Jika angka probabilitas signifikan < 0,05 maka pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Stastistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PrA	66	12,00	20,00	15,14	1,5776
PIA	66	12,00	20,00	15,52	1,8749
PjA	66	12,00	20,00	15,26	1,7125
EK	66	12,00	20,00	15,36	1,9583
AKIP	66	12,00	19,00	15,53	1,6753

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa: a) Variabel PrA memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 20,00. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah 15,14 dengan nilai standar deviasi 1,5776, b) Variabel PlA memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 20,00. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah 15,52 dengan nilai standar deviasi 1,8749, c) variabel PjA memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 20,00. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah 15,26 dengan nilai standar deviasi 1,7125, d) Variabel EK memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 20,00. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah 15,36 dengan nilai standar deviasi 1,9583, e) Variabel AKIP memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 19,00. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah 15,53 dengan nilai standar deviasi 1,6753. Maka berdasarkan pada nilai mean yang diperoleh dalam uji statistik deskriptif dapat diindikasikan jawaban pada variabel independen dan variabel dependen relatif baik.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji benar atau tidaknya suatu kuesioner sebagai indikator pengambilan data yang digunakan dalam penelitian. Data kuesioner dianggap valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka disimpulkan bahwa pernyataan indikator yang digunakan valid. Hasil pengujian data validitas dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Perencanaan Anggaran	PrA1	0,681	0,2423	Valid
	PrA2	0,745	0,2423	Valid
	PrA3	0,709	0,2423	Valid
	PrA4	0,715	0,2423	Valid
Pelaksanaan Anggaran	PlA1	0,630	0,2423	Valid
	PlA2	0,773	0,2423	Valid
	PlA3	0,766	0,2423	Valid
	PlA4	0,614	0,2423	Valid
Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran	PjA1	0,713	0,2423	Valid
	PjA2	0,782	0,2423	Valid
	PjA3	0,713	0,2423	Valid
	PjA4	0,569	0,2423	Valid
Evaluasi Kinerja	EK1	0,795	0,2423	Valid
	EK2	0,740	0,2423	Valid
	EK3	0,808	0,2423	Valid
	EK4	0,613	0,2423	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PrA1	0,721	0,2423	Valid
	PrA2	0,827	0,2423	Valid
	PrA3	0,822	0,2423	Valid
	PrA4	0,740	0,2423	Valid

Sumber: Kuesioner (2022)

Dalam Uji validitas pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan dibuktikan valid karena nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh melalui rumus $df = n - 2$, $\alpha = 5\%$ maka perhitungannya $66 - 2 = 64$. Nilai r_{tabel} $df = 64$, $\alpha = 5\%$ = 64 ialah 0.2423. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini menggunakan uji *Cronbach's alpha*. Jika dalam pengujiannya nilai *Cronbach's alpha* > 0,60, maka instrument penelitian dikatakan reliabel. Hasil dari perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliable	N of Items	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,678	0,60	4	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran	0,649	0,60	4	Reliabel
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran	0,637	0,60	4	Reliabel
Evaluasi Kinerja	0,727	0,60	4	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0,783	0,60	4	Reliabel

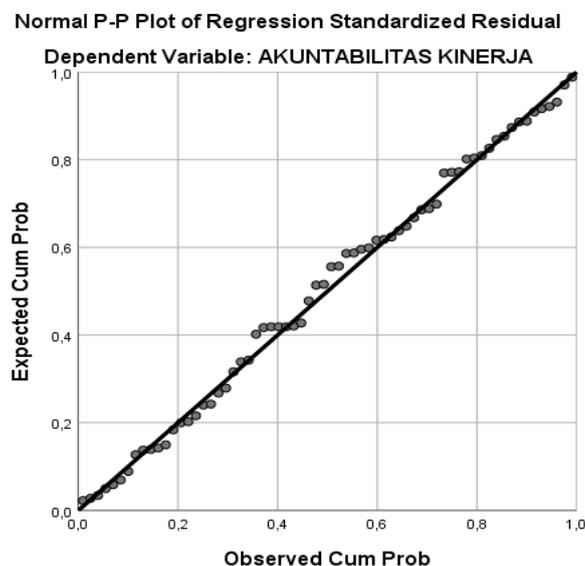
Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang tercantum dalam Tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* terhadap setiap variabel lebih besar dari 0,60 sehingga hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan, variabel-variabel yang tersedia memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan gambar di atas hasil uji normalitas menggunakan grafik *normal probability plot of regression standard* (P-plot) menunjukkan bahwa data penelitian menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan bahwa data berdistribusi normal maka dilakukan pengujian kembali menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Saat nilai signifikan melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas One-sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,84740925
Most Extreme Differences	Absolute	0,059
	Positive	0,040
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Kuesioner (2022)

Dari hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* yang tercantum pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas telah terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,005 dan dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (*independence*). Multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 10, maka model ini terbebas dari multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

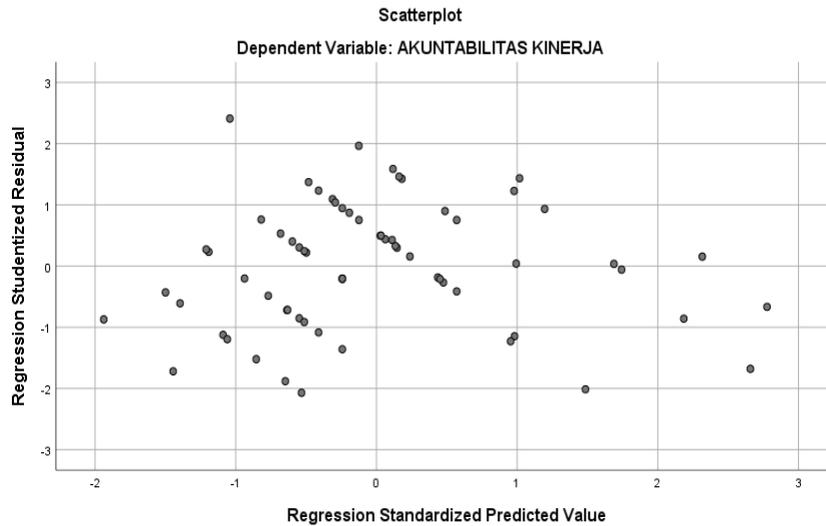
Model	Collinearity statistic	
	Tolerance	VIF
Perencanaan Anggaran	0,592	1,689
Pelaksanaan Anggaran	0,547	1,829
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran	0,582	1,718
Evaluasi Kinerja	0,402	2,486
Dependent Variabel : AKIP		

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang tercantum pada tabel di atas diketahui nilai *Tolerance* menunjukkan lebih besar dari 0, 10 lalu nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) Variabel-variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas serta telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang tepat adalah yang homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SREID.



Gambar 3
Uji Heterokedastisitas
 Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan gambar di atas hasil uji heterokedastisitas menggunakan grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa pola penyebaran titik-titik tidak beraturan dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga data pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan homokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis linear berganda digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen (perencanaan anggaran, pelaksana anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja) dengan variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) di Dinas Kota Surabaya. Berikut adalah hasil dari analisis linear berganda yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Coefficients Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,117	1,283		0,091	0,928
	PrA (X1)	0,243	0,089	0,229	2,724	0,008
	PIA (X2)	0,391	0,078	0,438	4,997	0,000
	PjA (X3)	0,171	0,083	0,175	2,059	0,044
	EK (X4)	0,199	0,087	0,232	2,274	0,027

Dependent Variabel : AKIP (Y)

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AKIP = 0,117 + 0,243PrA + 0,391PIA + 0,171PjA + 0,199EK + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nilai koefisien perencanaan anggaran (PrA) sebesar 0,243 sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, 2) Nilai koefisien pelaksanaan anggaran sebesar 0,391 sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan anggaran (PIA) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 3) Nilai koefisien pelaporan/pertanggungjawaban (PjA) anggaran sebesar 0,171 sehingga dapat diartikan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 4) Nilai koefisien evaluasi kinerja (EK) sebesar 0,199 sehingga dapat diartikan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika hasil uji F menunjukkan nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	135,763	4	33,941	44,356	,000 ^b
	Residual	46,677	61	0,765		
	Total	182,439	65			

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji f) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah..

Uji Koefisien Determnasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika nilai R² yang diperoleh mendekati angka 0 maka semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun apabila nilai R² yang diperoleh mendekati angka 1 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,863 ^a	0,744	0,727	0,875

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,744 atau 74,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja sebesar 0,744 atau 74,4% sedangkan sisanya 0,256 atau 25,6% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diketahui.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dalam menguji hipotesis nilai signifikan $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berikut adalah hasil dari uji hipotesis (Uji t) yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,117	1,283		0,091	0,928
PrA (X1)	0,243	0,089	0,229	2,724	0,008
PIA (X2)	0,391	0,078	0,438	4,997	0,000
PjA (X3)	0,171	0,083	0,175	2,059	0,044
EK (X4)	0,199	0,087	0,232	2,274	0,027

Dependent variable: AKIP

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), variabel independen memiliki nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan:

H₁ : Variabel perencanaan anggaran memiliki nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₂ : Variabel pelaksanaan anggaran memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₂ diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₃ : Variabel pelaporan/pertanggungjawaban anggaran memiliki nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₃ diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₄ : Variabel evaluasi kinerja memiliki nilai signifikansi $0,027 < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H₄ diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang dilakukan oleh variabel perencanaan anggaran menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,724 dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,243. Maka dapat diartikan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan anggaran merupakan tahapan awal dalam pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah instansi. Semakin baik atau besar perencanaan anggaran yang dilakukan maka semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan perencanaan anggaran yang baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sya'Roni dan Widayawati (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang dilakukan oleh variabel pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,997 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,391. Maka dapat diartikan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan terlaksananya anggaran dari kegiatan yang ada di instansi pemerintah. Pelaksanaan anggaran yang baik dalam suatu instansi memiliki input dan output yang baik juga. Semakin baik atau besar pelaksanaan anggaran yang dilakukan maka semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan pelaksanaan anggaran yang baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar *et al.*, (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Polda Papua) menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang dilakukan oleh variabel pelaporan/pertanggungjawaban anggaran menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,059 dengan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,171. Maka dapat diartikan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaporan/Pertanggungjawaban mencakup alokasi anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian keberhasilan kegiatan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberi informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Semakin baik atau besar pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan maka semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar *et al.* (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang dilakukan oleh variabel evaluasi kinerja menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,274 dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,199. Maka dapat diartikan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi kinerja digunakan untuk menganalisis upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan jika terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran. Selain itu, evaluasi kinerja merupakan analisis untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya evaluasi kinerja diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Sehingga Semakin baik evaluasi kinerja yang dilakukan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan evaluasi kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar *et al.*, (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Polda Papua) menunjukkan hasil bahwa evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Uji analisis linear berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh antar variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran mampu membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, 2) Variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, 3) Variabel pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, 4) Variabel evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja mampu membuktikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini maka saran yang dapat peneliti berikan melalui penelitian ini adalah: 1) Ruang lingkup penelitian tidak hanya pada 22 Dinas Kota Surabaya, sehingga hasil yang didapat akan mencerminkan kondisi yang ada pada instansi Kota Surabaya dan dapat digeneralisasikan pada semua keadaan, 2) Teknik pengambilan data sebaiknya dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada responden yang berwenang dilingkungan pemerintah Kota Surabaya untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti, 3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen yang tidak ada pada penelitian ini supaya menjadi acuan baru untuk menentukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Y dan B. H. Puranto. 2010. *Anggaran berbasis kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Anwar, A.A., R. Laan, dan H. Sunarya. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang* 3(1).
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Cetakan Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ginanjari, D., F. Pasolo, dan K. Saleh. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Polda Papua). *The Journal of Business and Management Research* 2(2).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mahmudi. 2016. *Akuntanis Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2(1).
- _____. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sya'Roni, M dan D. Widyawati. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(8).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.